

KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT DAN DETERMINANNYA

(POVERTY IN SULAWESI BARAT PROVINCE AND ITS DETERMINANTS)

Dwi Ardian¹, Rani Nooraeni²

¹Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Jl. RE Martadinata No. 10 Mamuju

²Politeknik Statistika STIS Jakarta, Jl. Otista No. 64C Jakarta Timur

E-mail: dwiardian48@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami perlambatan penurunan, bahkan konsisten mengalami peningkatan sejak tahun 2021-2024, menempatkan kemiskinan Sulawesi Barat selalu di atas kemiskinan nasional yang cenderung menurun hingga ke angka satu digit. Peran sektor pertanian dan lapangan usaha sektor informal yang mendominasi dengan rata-rata pendapatan di bawah UMP diduga sebagai faktor utama penyebab kemiskinan. Selain itu, faktor kesehatan dan faktor pendidikan juga diduga cukup berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian penelitian ini akan mengkaji mengenai keterkaitan PDRB sektor pertanian, ketenagakerjaan, kesehatan, dan indikator pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat, meliputi tingkat kemiskinan, PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian, tingkat pengangguran terbuka, usia harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah, pada 6 kabupaten selama periode 2015-2024. Data dianalisis menggunakan regresi data panel. Variabel PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT), usia harapan hidup (UHH), serta rata-rata lama sekolah (RLS) tidak signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi (R^2) mencapai 64,62 persen menunjukkan variabel bebas cukup kuat menjelaskan variabel terikat. Melihat peran sektor pertanian yang krusial di Sulawesi Barat, perlu dilakukan peningkatan produktivitas dengan berbagai cara seperti membangun infrastruktur penunjang, penerapan teknologi modern, dan sebagainya.

Kata kunci: kemiskinan, PDRB sektor pertanian, TPT, UHH, RLS

ABSTRACT

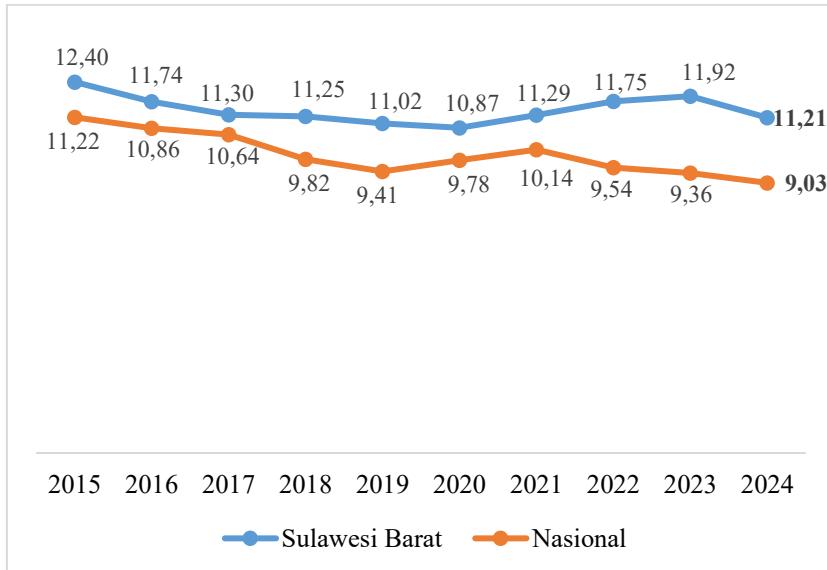
Poverty in Sulawesi Barat Province has experienced a slow decline, and has even consistently increased since 2021-2024, placing Sulawesi Barat poverty always above national poverty which tends to decline to single digits. The role of the agricultural sector and informal sector businesses which dominate with an average income below the UMP is thought to be the main factor causing poverty. Apart from that, health factors and educational factors are also thought to have quite an influence on people's productivity in meeting their basic needs. Thus, this research will examine the relationship between GRDP in the agricultural sector, employment, health and education indicators to poverty in Sulawesi Barat Province. The data used is secondary data that has been released by BPS-Statistic of Sulawesi Barat Province, including poverty levels, GRDP based on constant agricultural sector prices, open unemployment rates, life expectancy, and average years of schooling, in 6 districts during the 2015-2024 period. Data were analyzed using panel data regression. The GRDP variable based on constant prices in the agricultural sector has a negative and significant influence on poverty. The variable open unemployment rate (TPT), life expectancy (UHH), and average years of schooling (RLS) insignificant influence on poverty. The coefficient of determination (R^2) reached 64.62 percent, indicating that the independent variable is strong enough to explain the dependent variable. Seeing the crucial role of the agricultural sector in Sulawesi Barat, it is necessary to increase productivity in various ways such as building supporting infrastructure, applying modern technology, and so on.

Keywords: poverty, GRDP in the agricultural sector, unemployment rate, life expectancy, average years of schooling

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi ini, dengan kekayaan alam dan potensi yang melimpah, masih dihadapkan pada angka kemiskinan yang relatif tinggi. Memahami akar permasalahan kemiskinan

di Sulawesi Barat menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 9,03 persen, mengalami penurunan relatif konsisten sejak tahun 2015 yang mencapai 11,22 persen (BPS, 2024). Kemiskinan Sulawesi Barat juga mengalami penurunan sejak 9 tahun terakhir, yaitu turun menjadi 11,21 persen pada tahun 2024 dari 12,40 persen pada tahun 2015 (BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2024).



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Sulawesi Barat dan Nasional (persen), 2015-2024

Penurunan kemiskinan Sulawesi Barat relatif lambat dan masih lebih tinggi dari kemiskinan nasional. Selain itu, masih jauh dari target penurunan hingga 8,01 persen hingga tahun 2025 nanti (Setda Provinsi Sulawesi Barat, 2010). Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena ketika kemiskinan Sulawesi Barat cenderung meningkat di saat yang sama kemiskinan nasional mengalami penurunan hingga ke level satu digit. Berdasarkan Gambar 1 diperoleh informasi bahwa Tingkat kemiskinan Sulawesi Barat selalu di atas nasional. Tahun 2015 mencapai 12,40 persen Sulawesi Barat berbanding 11,22 persen Indonesia. Tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Barat adalah pada tahun 2020, yaitu 10,87 persen, sedangkan tingkat kemiskinan nasional yang terendah adalah tahun 2024, yakni 9,03 persen.

Menurut Todaro dan Smith (2015) kemiskinan dipengaruhi banyak faktor, seperti faktor kesehatan, faktor pendidikan, penduduk yang bekerja, dan pertumbuhan ekonomi, yang saling berkaitan satu sama lain. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 menyatakan bahwa sektor pertanian di Sulawesi Barat menjadi sektor yang mendominasi perekonomian, 42 persen PDRB disumbang oleh sektor pertanian, kemudian penduduk yang bekerja di sektor pertanian juga yang terbesar. Peran besar sektor pertanian tentunya juga menjadi tumpuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga bisa dikatakan keluar dari kemiskinan. Anggraini dan Pujiati (2022) menyatakan bahwa PDRB sektor pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, berbeda dengan Sandira (2022) yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan PDRB terhadap kemiskinan.

PDRB sektor pertanian dan penduduk yang bekerja adalah permasalahan di Sebagian besar daerah di Indonesia. Sektor pertanian mendominasi hampir separuh PDRB sedangkan pengangguran adalah hal utama sebagai faktor yang menentukan pendapatan masyarakat. Prasetyoningrum dan Sukmiawati (2018) menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal itu sesuai dengan temuan Siyan, dkk. (2016), Badu, dkk. (2020), serta Hilmi, dkk. (2022), tetapi banyak penelitian lain menyatakan sebaliknya bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, seperti penelitian Sayifullah dan Gandasari (2016), Hanifah dan Hanifa (2021), Probosiwi (2016), serta Isa, dkk. (2019). Penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa tidak ada pengaruh signifikan TPT terhadap kemiskinan menyatakan bahwa ada faktor lain, seperti kualitas pekerja yang tidak optimal serta

lapangan usaha informal yang banyak, sehingga membuat pendapatan masyarakat tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar.

Kondisi kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat berdasarkan usia harapan hidup (UHH) menjadi sesuatu hal yang krusial dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dalam pekerjaannya dan memberikan ide yang bagus dalam pembangunan. Tombolotutu, dkk. (2018) serta Ginting (2022) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan usia harapan hidup terhadap kemiskinan, berbeda dengan penelitian Pramesti dan Bendesa (2018) serta Islami dan Anis (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan usia harapan hidup terhadap kemiskinan.

Pendapatan atau upah berkaitan dengan karakteristik pendidikan para pekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka memungkinkan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang tinggi akan membuat peluang untuk tidak jatuh ke dalam garis kemiskinan semakin kecil. Tingkat pendidikan biasanya ditunjukkan atas rata-rata lamanya bersekolah, tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap kemiskinan (Susanto & Pangesti, 2019). Sudaryati, dkk. (2021) juga menyimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemiskinan, berbeda dengan penelitian Choirur (2021) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh informasi bahwa masih terdapat perbedaan kesimpulan signifikansi terkait determinan kemiskinan, seperti PDRB sektor pertanian, tingkat pengangguran terbuka (TPT), usia harapan hidup (UHH), dan rata-rata lama sekolah (RLS), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sangat bergantung terhadap lokus penelitian dan ketersediaan data serta waktu penelitian. Hal ini menjadi alasan kuat untuk dilakukan penelitian serupa di Sulawesi Barat.

Penelitian ini akan memberikan gambar yang cukup komprehensif terkait kemiskinan di Sulawesi Barat beserta faktor-faktor yang dianggap memengaruhinya. Kebaruan yang bisa ditemukan seperti ulasan dan analisis mendalam pada series data selama beberapa tahun yang sebelumnya belum pernah dikaji secara mendalam. Berdasarkan gap penelitian sebelumnya dan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian atau rumusan masalah penelitian ini adalah bahwa bagaimana gambaran kemiskinan di Sulawesi Barat dan apa saja determinannya di Sulawesi Barat.

Secara spesifik penelitian ini akan mengkaji mengenai permasalahan seperti bagaimana gambaran dan pengaruh PDRB sektor pertanian terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat, bagaimana gambaran dan pengaruh TPT terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat, bagaimana gambaran dan pengaruh UHH terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat, serta bagaimana gambaran dan pengaruh RLS terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat.

TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan

Kemiskinan menjadi permasalahan utama setiap daerah, bahkan semua negara. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan (Todaro & Smith, 2015). Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya adalah tingkat pendapatan rendah, distribusi pendapatan yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kurangnya lapangan kerja, serta ketergantungan terhadap sektor pertanian (Todaro & Smith, 2015).

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik dari sisi makanan maupun nonmakanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan di Indonesia diukur dengan batasan garis kemiskinan, setiap individu yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan orang miskin. Survei untuk mengetahui pengeluaran masyarakat disebut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPS (BPS, 2024).

PDRB Sektor Pertanian

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Salah satu sektor pada PDRB yang memiliki peran krusial bagi penduduk miskin adalah sektor pertanian (BPS, 2024). Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang menjadi penopang utama perekonomian di Indonesia (Hasang, 2020). Pada saat pandemi Covid-19, terbukti bahwa salah satu sektor yang cukup kebal terhadap pandemi adalah sektor pertanian. Pada saat sektor lain terpuruk, maka sektor pertanian bisa tetap tumbuh (Ladjin, 2020).

PDRB sektor pertanian memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi PDRB sektor pertanian maka akan semakin menurunkan kemiskinan (Anggraini & Pujiati, 2022). Sektor pertanian masih menjadi penyumbang lapangan usaha terbesar, sehingga ketika sektor ini bisa tumbuh dengan baik maka akan membuat banyak masyarakat yang ikut merasakannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Yang termasuk penganggur adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2024).

Pengangguran berarti hilangnya sumber pendapatan utama bagi individu dan keluarga. Hal ini secara langsung meningkatkan risiko jatuh miskin, terutama bagi keluarga yang bergantung pada satu sumber pendapatan. Penurunan pendapatan akibat pengangguran dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Hal ini memperparah kondisi kemiskinan. Pengangguran dapat menjebak individu dan keluarga dalam lingkaran setan kemiskinan. Kurangnya pendapatan membuat mereka sulit untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik semakin berkurang (Todaro & Smith, 2015).

Iskandar dan Subekan (2016) menguraikan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki peran krusial dalam mengatasi kemiskinan. Jika tingkat pengangguran terbuka bisa diturunkan, maka akan membuat tingkat kemiskinan juga akan turun. Beberapa daerah di Indonesia dan negara Asean serta Afrika menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan (Sari, 2021).

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu bangsa. UHH didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh setiap orang yang lahir pada suatu tahun tertentu, dengan asumsi bahwa tingkat kematian pada setiap usia akan tetap seperti pada tahun tersebut (BPS, 2024).

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi UHH di antaranya adalah akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi sanitasi dan air minum, tingkat gizi, serta gaya hidup. Akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan UHH. Tingkat pendidikan yang tinggi umumnya berkaitan dengan gaya hidup yang lebih sehat dan UHH yang lebih panjang. Kondisi sanitasi dan air minum yang baik dapat mencegah penyakit dan meningkatkan UHH. Gizi yang baik pada masa kanak-kanak dapat meningkatkan UHH di kemudian hari. Gaya hidup sehat seperti tidak merokok, berolahraga, dan makan makanan bergizi dapat meningkatkan UHH (Agung & Budiarti, 2022).

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat pendidikan suatu bangsa. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani (BPS, 2024).

Terdapat hubungan yang erat antara dimensi pendidikan dan kemiskinan. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan peluang kerja, meningkatkan produktivitas, serta memutuskan lingkaran setan kemiskinan (Thahir, dkk., 2021).

Bukti empiris menunjukkan bahwa RLS dan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, setiap tahun tambahan pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 10 persen (Khokhar, 2017). Studi UNESCO menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang, tingkat kemiskinan di antara orang dewasa yang tidak berpendidikan adalah dua kali lipat dari mereka yang memiliki pendidikan dasar, dan empat kali lipat dari mereka yang memiliki pendidikan menengah atas (Unesco, 2017).

METODE

Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan salah satu metode analisis statistik yang sering digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi waktu (*time*) dan dimensi individu (individual). Dibandingkan dengan metode analisis statistik lainnya, regresi data panel memiliki beberapa keunggulan, seperti mengatasi masalah heterogenitas, meningkatkan efisiensi estimasi, menganalisis hubungan dinamis, mengatasi masalah multikolinearitas, meningkatkan kekuatan statistik, menganalisis efek kebijakan, meningkatkan fleksibilitas analisis. Regresi data panel merupakan metode analisis statistik yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis data panel. Keunggulan regresi data panel dibandingkan dengan metode analisis statistik lainnya menjadikannya alat yang berharga untuk para peneliti di berbagai bidang, seperti ekonomi, keuangan, manajemen, dan kebijakan publik (Hsiao, 2022).

Kemiskinan di Sulawesi Barat sejauh penelusuran penulis belum pernah dilakukan, utamanya dengan kajian mendalam dan menggunakan data series yang cukup panjang. Regresi data panel dapat digunakan untuk menganalisis efek kebijakan atau intervensi terhadap variabel terikat (kemiskinan). Hal ini karena regresi data panel memungkinkan untuk mengontrol efek individu dan efek waktu, sehingga dapat memberikan hasil analisis yang lebih kausal (Ghozali, 2018).

Pemilihan model terbaik regresi data panel dilakukan dengan serangkaian uji, seperti Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Legrange Multiplier. Sebelum itu, terlebih dahulu dilakukan serangkaian uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Regresi mensyaratkan distribusi eror yang normal, artinya nilai eror terdistribusi secara simetris di sekitar mean (Ghozali, 2018). Uji normalitas dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB) *probability statistic* dan nilai signifikansi alfa 5 persen. Jika $JB \text{ probability statistic} > 0,05$ (signifikansi alfa 5 persen) berarti data berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Jika koefisien korelasi di bawah 0,80 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah Uji Glejser. Jika nilai *probability* $> 0,05$, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

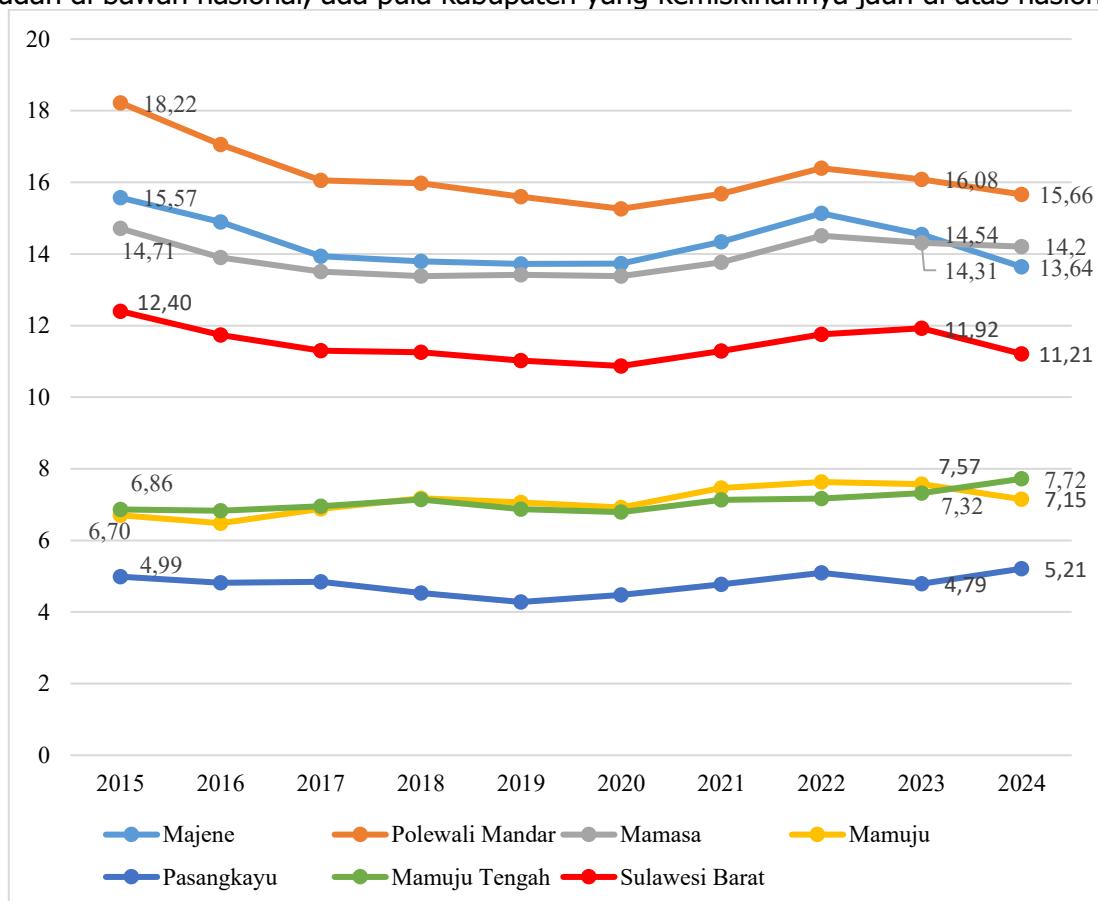
Kesimpulan pemilihan model diperoleh setelah serangkaian uji yang dilakukan, seperti Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Legrange Multiplier. Ketika membandingkan apakah *common effect model* atau *fixed effect model*, maka dilakukan Uji Chow, signifikan menandakan bahwa *fixed effect model* lebih baik. Membandingkan antara *random effect model* dan *fixed effect model* dilakukan Uji Hausman, signifikan menandakan bahwa *fixed effect model* adalah model yang terbaik. Uji Lagrange Multiplier adalah uji untuk membandingkan antara *random effect model* dan *common effect model*

yang terbaik. Ketika Uji Chow dan Uji Hausman sudah disimpulkan bahwa model terbaik adalah *fixed effect model*, maka Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan lagi (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi ke-33 pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2004. Kemiskinan provinsi yang terdiri atas 6 kabupaten ini selama resmi berdiri, mengalami kecenderungan penurunan, meskipun tingkat kemiskinannya masih berada di atas nasional. Kemiskinan menurut kabupaten di Sulawesi Barat mengalami penurunan sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, meski penurunannya relatif lambat. Besaran kemiskinan tersebut ada kabupaten yang sudah di bawah nasional, ada pula kabupaten yang kemiskinannya jauh di atas nasional.



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten se-Sulawesi Barat (persen), 2015-2024

Berdasarkan Gambar 2, diperoleh informasi bahwa kemiskinan 6 kabupaten di Sulawesi Barat terbagi dua, 3 kabupaten di atas provinsi dan 3 kabupaten di bawah provinsi. Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi. Kabupaten Majene merupakan kabupaten kedua dengan kemiskinan tertinggi, disusul Kabupaten Mamasa. Kabupaten dengan kemiskinan terendah adalah Kabupaten Pasangkayu, Kemudian Mamuju Tengah, dan Mamuju. Ketiga kabupaten terendah tersebut kemiskinannya relatif stagnan.

PDRB Sektor Pertanian di Sulawesi Barat

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusinya terhadap total PDRB konsisten selalu yang teratas. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian mencapai 41,99 persen, kemudian pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 46,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian Sulawesi Barat.

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian konsisten mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2015 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa selalu ada nilai tambah yang lebih besar dari tahun sebelumnya (t-1) karena pertumbuhan diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Tahun 2015 PDRB sektor pertanian (adhk) mencapai Rp10,31 triliun meningkat menjadi Rp14,54 triliun pada tahun 2024.

TPT di Sulawesi Barat

TPT di Sulawesi Barat sudah termasuk yang terendah. Pada tahun 2015 TPT Sulawesi Barat 3,35 persen, jauh di bawah nasional yang mencapai 6,18 persen. Pada tahun 2024 TPT Sulawesi Barat turun menjadi 2,27 persen, masih di bawah nasional yang mencapai 5,32 persen. TPT kabupaten di Sulawesi Barat sudah cukup rendah, tetapi tidak cukup berarti terhadap pendapatan masyarakat yang bekerja. Hal ini disebabkan oleh mayoritas pekerja di Sulawesi Barat, yakni mencapai 73 persen pada 2024, bekerja di sektor informal. Sedangkan rata-rata pendapatan dari sektor informal hanya mencapai Rp1,165 juta, jauh di bawah upah minimum Sulawesi Barat yang mencapai Rp2,872 juta (BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2024).

UHH di Sulawesi Barat

UHH di Sulawesi Barat pada tahun 2024 mencapai 66,27 tahun, masih jauh di bawah nasional, yakni 72,39 tahun. UHH Sulawesi Barat telah mengalami peningkatan cukup baik sejak tahun 2015 yang sebesar 64,22 tahun di saat nasional mencapai 69,55 tahun (BPS, 2024). UHH tertinggi ada di Kabupaten Mamasa yang mencapai 70,38 tahun 2015 dan meningkat menjadi 73,62 pada tahun 2024. Sedangkan, kabupaten terendah adalah Majene dengan UHH pada 2015 60,51 tahun dan meningkat menjadi 64,82 tahun 2024. Semua kabupaten mengalami peningkatan UHH dari tahun ke tahun, meski pertumbuhannya relatif lambat.

RLS di Sulawesi Barat

RLS di Sulawesi Barat baru mencapai 8,48 pada tahun 2024, masih jauh di bawah nasional yang mencapai 9,13 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 7,49 tahun berbanding 8,32 tahun. RLS tertinggi di Sulawesi Barat ada di Kabupaten Majene, mencapai 7,74 tahun 2015 meningkat menjadi 9,28 tahun 2024. RLS terendah adalah di Kabupaten Polewali Mandar, sebesar 6,77 tahun 2015 dan sebesar 7,71 tahun 2024. Semua kabupaten konsisten mengalami peningkatan RLS dari tahun ke tahun, meskipun belum terlihat percepatan peningkatannya.

Penelitian ini mengkaji mengenai kemiskinan di Sulawesi Barat dan determinannya. Variabel-variabel yang diteliti antara lain adalah tingkat kemiskinan (variabel respons), serta variabel bebas yang diteliti, seperti PDRB sektor pertanian, tingkat pengangguran terbuka (TPT), usia harapan hidup (UHH), dan rata-rata lama sekolah (RLS). Metode analisis data pada penelitian ini adalah regresi data panel. Series data yang digunakan tahun 2015-2024, merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi maupun *website* resmi BPS Provinsi Sulawesi Barat. Dalam menentukan model terbaik dari regresi data panel, digunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan syarat dari analisis regresi data panel yang dilakukan sudah memenuhi syarat. Uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada gejala multikolinearitas antarvariabel bebas. Uji heteroskedastisitas untuk memastikan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi untuk memastikan tidak ada gejala autokorelasi.

Hasil uji JB menunjukkan bahwa nilai *probability*-nya sebesar $0,146 > 0,05$ yang menandakan bahwa residual data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas, yakni dengan melihat korelasi antarvariabel bebas, korelasi antarvariabel bebas semua di bawah 0,80 yang berarti bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Meneliti gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser,

berdasarkan uji yang dilakukan diperoleh informasi bahwa semua nilai probabilitas statistiknya di atas signifikansi alfa 5 persen (0,215), sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi. Jika hasil pengolahan data nilai *p-value* lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 (5 persen), maka model yang dipilih adalah FEM, jika sebaliknya maka model yang dipilih adalah CEM. Hasil pengolahan menunjukkan nilai *probability* sebesar $0,000 < 0,05$ yang menandakan bahwa model yang terbaik adalah FEM.

Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik untuk menentukan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Jika *p-value* lebih kecil dari *alpha* 0,05 (5 persen) berarti bahwa model yang terbaik adalah FEM, jika sebaliknya maka model terbaik adalah REM. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ yang menandakan bahwa model yang terbaik adalah FEM.

Uji Lagrange Multiplier

Berdasarkan dua uji yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa model yang terbaik adalah FEM, sehingga Uji Lagrange Multiplier tidak perlu lagi dilakukan karena kesimpulan akan tetap sama, yakni model terbaik adalah FEM. Berdasarkan Tabel 1, diperoleh informasi bahwa dari model terbaik (FEM), diperoleh kesimpulan bahwa variabel yang signifikan memengaruhi kemiskinan adalah PDRB sektor pertanian, di mana nilai probabilitasnya di bawah nilai alfa 5 persen (0,0031). Ada pun variabel lain, seperti tingkat pengangguran terbuka, usia harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemiskinan. Terlihat dari probabilitasnya di atas alfa 5 persen semua.

Tabel 1. Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,707808	5,701945	-0,124135	0.9018
PDRB_A	-1,756627	0,560446	-3,134338	0.0031
TPT	-0,041625	0,114551	-0,363371	0.7181
UHH	-0,001843	0,000989	-1,863215	0.0691
RLS	-0,376130	0,337404	-1,114775	0.2710
<i>R-squared</i>				0,646241
<i>F-statistic</i>				453,5102
<i>Prob(F-statistic)</i>				0,000000
<i>Durbin-Watson stat.</i>				0,787026

Hasil regresi dengan *fixed effect model* (Tabel 1) menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan PDRB sektor pertanian terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat, artinya semakin besar PDRB sektor pertanian maka akan signifikan menurunkan kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Anggraini & Pujiati (2022), namun berbeda dari kajian Andira (2022).

Hasil analisis regresi data panel dengan *fixed effect model* (Tabel 1) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti TPT terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. Hal ini menegaskan bahwa meskipun Sulawesi Barat TPT-nya relatif rendah tetapi rata-rata pendapatan masih relatif rendah juga, disebabkan karena mayoritas masyarakat yang bekerja ada pada sektor informal yang rata-rata pendapatannya jauh di bawah UMP. Kesimpulan temuan ini sesuai dengan penelitian Iskandar dan Subekan (2016), tetapi berbeda dengan temuan Sari (2021).

Hasil regresi data panel (Tabel 1) menunjukkan bahwa UHH tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. UHH di Sulawesi Barat belum menggambarkan produktivitas masyarakat secara nyata karena lapangan pekerjaan yang tersedia didominasi oleh

sektor informal yang rata-rata pendapatannya rendah. Kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian Pramesti dan Bendesa (2018) serta Islami dan Anis (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh berarti UHH terhadap kemiskinan, berbeda dengan kajian Tombolotutu, dkk. (2018) serta Ginting (2022) yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan usia harapan hidup terhadap kemiskinan.

Hasil regresi data panel (Tabel 1) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan RLS terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. Pendidikan yang tinggi belum mencerminkan pendapatan yang tinggi pula di Sulawesi Barat, berdasarkan data Sakernas BPS Provinsi Sulawesi Barat (2024) bahwa rata-rata pendapatan jika pendapatan semakin tinggi juga akan lebih tinggi, akan tetapi jumlah pengangguran di Sulawesi Barat justru didominasi oleh pendidikan SMK dan perguruan tinggi, yang berarti bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan belum cukup memadai untuk mengakomodasi masyarakat dengan pendidikan tinggi. Kesimpulan ini sesuai dengan penelitian Choirur (2021) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian Susanto dan Pangesti (2019) serta Sudaryati, dkk. (2021) yang menyimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemiskinan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Saran yang bisa diberikan terkait temuan penelitian ini, seperti perlunya dilakukan upaya hilirisasi produk pertanian agar lebih meningkatkan nilai tambah, tidak hanya dijual mentah saja tetapi bisa diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi kemudian dijual ke luar negeri atau provinsi lain. Upaya lain adalah berupa peningkatan produktivitas dengan berbagai cara, seperti membangun infrastruktur penunjang, penerapan teknologi modern, dan sebagainya. Terkait kondisi lapangan pekerjaan yang didominasi oleh sektor informal dengan pendapatan yang rendah, perlu peningkatan kualitas produksi dengan berbagai pelatihan keterampilan serta penciptaan lapangan pekerjaan formal yang lebih tinggi rata-rata pendapatannya.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah perlu kajian mendalam mengenai sektor-sektor informal di Sulawesi Barat. Perlu memetakan kebutuhan, tantangan, serta peluang dari sektor informal, sehingga diharapkan bisa menjadi keunggulan Sulawesi Barat.

KESIMPULAN

Kemiskinan sejak tahun 2015 hingga 2020 di Sulawesi Barat konsisten mengalami penurunan, setelah tahun 2020 hingga tahun 2024 hampir semua kabupaten mengalami peningkatan, termasuk total provinsi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang melihat series data tahunan dan individual. Berdasarkan kajian yang dilakukan mengenai kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dan determinannya, diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan minimal ada satu variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Adapun secara parsial, PDRB sektor pertanian memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap kemiskinan, sedangkan TPT, UHH, dan RLS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien determinasi (R^2) mencapai 64,62 persen menunjukkan variabel bebas cukup kuat menjelaskan variabel terikat.

PDRB sektor pertanian atas dasar harga konstan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat disebabkan oleh setiap nilai tambah dari sektor ini langsung dirasakan oleh masyarakat kategori menengah ke bawah, di mana lapangan usaha utama mereka adalah pada sektor pertanian. Sehingga, ketika nilai tambah sektor pertanian meningkat maka akan menurunkan kemiskinan secara signifikan, sebaliknya jika PDRB sektor pertanian menurun maka akan mengakibatkan kemiskinan meningkat secara signifikan.

Kemiskinan di Sulawesi Barat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh TPT, UHH, dan RLS. TPT Sulawesi Barat sudah cukup rendah, yakni di bawah angka nasional dan cukup konsisten mengalami penurunan, tetapi tidak turut menurunkan kemiskinan secara signifikan karena lapangan pekerjaan di Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor informal yang rata-rata pendapatannya jauh di bawah UMP Sulawesi Barat. UHH di Sulawesi Barat cukup konsisten mengalami peningkatan di semua kabupaten, tetapi tidak menurunkan kemiskinan secara signifikan karena dimensi kesehatan masyarakat yang diukur dari UHH tidak cukup membantu mengoptimalkan produktivitas masyarakat. RLS pun begitu, yakni tidak cukup membantu menurunkan kemiskinan karena sedianya

semakin tinggi pendidikan maka akan meningkatkan pendapatan juga, tetapi Sulawesi Barat didominasi sektor informal sehingga tenaga kerja yang terserap masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Books:

- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hsiao, C. (2022). Analysis of panel data (No. 64). Cambridge university press.
- Ismail Hasang, S. E., & Nur, M. (2020). Perekonomian Indonesia. Ahlimedia Book.
- Todaro, M.P. dan Smith, S. (2013). Pembangunan Ekonomi. Edisi 11. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M.P. dan Smith, S. (2015). Economic Development, Pearson Education Limited, London.

Book Chapters:

- Nurjanna Ladjin, S. E. (2020). Antara Sektor Pertanian dan Pembangunan. Book Chapter, 31.
- Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. (2010). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2010-2025. Mamuju.

Journal Articles:

- Anggraini, H. Y., & Pujiati, A. (2022). The Influence of the Tourism Sector and GRDP on Poverty. Efficient: *Indonesian Journal of Development Economics*, 5(2), 174-181.
- Badu, R. R., Canon, S., & Akib, F. H. Y. (2020). The impact of economic growth and unemployment rate on poverty in sulawesi. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(1).
- Choirur, R. (2021). The effect of education and unemployment on poverty in Jambi Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(01), 31-43.
- Ginting, A. L. (2020). Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 42-61.
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191-206.
- Hilmi, H., Nasir, M., Ramlawati, R., & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tolitoli. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20-27.
- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of capital expenditures, development index and unemployment on poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1).
- Iskandar, A., & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan (Determinant Analysis of Poverty in South Sulawesi). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2, 1-25.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di indonesia. *Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan*, 1(3), 939-948.
- Pramesti, N. A. T., & Bendesa, I. K. G. (2018). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(9), 1887-1917.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217-240.
- Probosiwi, R. (2016). Unemployment and its influence on poverty level. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 89-100.
- Sandira, N. F. A. (2022). The Effect of Population and GRDP and Poverty on Economic Growth in Makassar City. *Journal of Business Issues*, 1(2), 109-117.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2), 121-130.

- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).
- Siyan, P., Adegoriola, A. E., & Adolphus, J. A. (2016). Unemployment and inflation: Implication on poverty level in Nigeria. *Journal of Development and Society*, Vol. 3, No. 4 (10 November 2016): pp. 17-45.
- Sudaryati, S., Ahmad, A. A., & Suprapto, S. (2021). The Effect of Average Length of Schooling, Life Expectancy and Economic Growth on Poverty in Banjarnegara Regency 2005-2019. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 16(1).
- Thahir, M. I., Semmaila, B., & Arfah, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten takalar. *Journal of Management Science (JMS)*, 2(1), 61-81.
- Tombolotutu, A. D., Djirimu, M. A., Lutfi, M., & Anggadini, F. (2018, May). Impact of life expectancy, literacy rate, opened unemployment rate and gross domestic regional income per capita on poverty in the districts/city in Central Sulawesi Province. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 157, No. 1, p. 012058). IOP Publishing.

Conference Proceedings:

- Agung, A. I., & Budiarti, W. (2022, November). Determinan Kemiskinan di DI Yogyakarta Tahun 2011-2020. In Seminar Nasional Official Statistics (Vol. 2022, No. 1, pp. 343-352).

Online Sources:

- BPS Provinsi Sulawesi Barat. (2024). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat. Diakses melalui sulbar.bps.go.id pada Sabtu, 1 Juni 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Konsep Definisi Kemiskinan. Diakses melalui bps.go.id pada Ahad, 2 Juni 2024.
- Unesco. (2017). World Poverty Could Be Cut in Half if All Adults Completed Secondary Education. Montreal Quebec: Unesco Institute for Statistic.
- Khokhar, T. (2017). A crisis in learning: 9 charts from the 2018 World Development Report. Washington DC: World Bank.